
HEXAHELIX COLLABORATION DALAM MEWUJUDKAN INOVASI BERKELANJUTAN DI KOTA BANJAR

Riza Purnama¹, Tina Cahya Mulyatin², Teguh Anggoro³, Tofan Ibrahim⁴

^{1,2,3,4} Ilmu Pemerintahan, STISIP Bina Putera Banjar, Indonesia

Received: 05 Feb

Revised: 11 Feb

Accepted: 13 Feb

Abstrak

Inovasi berkelanjutan menjadi salah satu agenda penting dalam tata kelola pemerintahan daerah untuk meningkatkan daya saing dan kualitas pelayanan publik. Pemerintah Kota Banjar menghadapi tantangan dalam mewujudkan inovasi yang tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga memiliki keberlanjutan dan dampak nyata bagi masyarakat. Pendekatan kolaborasi hexahelix yang melibatkan unsur pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas, media, serta sektor keuangan menjadi strategi yang relevan untuk memperkuat ekosistem inovasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis model kolaborasi hexahelix yang diimplementasikan Pemerintah Kota Banjar dalam mendorong inovasi berkelanjutan. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan analisis literatur terkini serta data faktual dari kebijakan dan program Pemerintah Kota Banjar. Hasil analisis menunjukkan bahwa kolaborasi lintas aktor mampu memperkuat kapasitas inovasi daerah, meskipun masih terdapat kendala pada aspek koordinasi, keterbatasan sumber daya, dan keberlanjutan program. Artikel ini menegaskan pentingnya sinergi aktor hexahelix untuk membangun tata kelola kolaboratif yang berorientasi pada inovasi berkelanjutan di tingkat lokal.

Kata Kunci : Hexahelix, Kolaborasi, Inovasi Berkelanjutan, Pemerintahan Daerah, Kota Banjar

ABSTRACT

Sustainable innovation has become a crucial agenda in local governance to enhance competitiveness and improve the quality of public services. The Government of Banjar City faces challenges in developing innovations that are not only short-term but also sustainable and impactful for society. The hexahelix collaboration approach, which involves the government, academia, business sector, community, media, and financial institutions, emerges as a relevant strategy to strengthen the regional innovation ecosystem. This study aims to analyze the hexahelix collaboration model implemented by the Banjar City Government in promoting sustainable innovation. The research employs a descriptive qualitative approach through a review of recent literature and factual data from local policies and programs. The findings indicate that cross-actor collaboration enhances the capacity for regional innovation, although several challenges remain in coordination, resource limitations, and program sustainability. This article highlights the importance of hexahelix synergy in building collaborative governance oriented toward sustainable innovation at the local level.

Keywords: Hexahelix; Collaboration; Sustainable Innovation; Local Government; Banjar City

PENDAHULUAN

Pemerintah daerah menghadapi dua tuntutan utama: mempercepat inovasi layanan publik sekaligus memastikan keberlanjutan hasil inovasi agar tidak berhenti pada proyek jangka pendek. Pengalaman sejumlah kota menunjukkan bahwa pendekatan kolaboratif lintas-aktor—yang tidak hanya mengandalkan birokrasi, tetapi juga melibatkan dunia usaha, akademisi, komunitas, media, serta pemangku kepentingan strategis lainnya—lebih mampu menjaga kontinuitas inovasi sekaligus memperluas dampak sosialnya. Kerangka ini dalam literatur diposisikan sebagai evolusi dari penta-helix menuju hexa-helix, yakni model kolaborasi multi-aktor yang menambahkan simpul peran baru untuk memperkuat ekosistem inovasi daerah (Al Qodri, Sunarsi, Sholichah, & Dewi, 2024).

Sejumlah temuan mutakhir menegaskan bahwa tata kelola deliberatif dan regulasi kolaboratif memperkuat perlindungan sosial dan kualitas kebijakan melalui pelibatan aktor non-negara dalam perumusan serta implementasi kebijakan (Kurniawan & Prasetyo, 2025). Di tingkat kota, kolaborasi pemangku kepentingan pada penataan kawasan kumuh bantaran sungai menunjukkan bahwa problem-solving bersama dan shared ownership mampu mendorong layanan dasar yang lebih berkelanjutan (Handayani, Nugroho, & Rahmawati, 2024). Selain faktor kelembagaan, perilaku inovatif aparatur yang ditopang kepemimpinan partisipatif juga sangat menentukan keberlangsungan inovasi. Budaya kerja yang mendorong ide baru, eksperimen, dan pembelajaran lintas unit dapat mempercepat replikasi inovasi antarperangkat daerah (Hidayat & Yuliani, 2025). Namun, kolaborasi tidak terjadi secara otomatis. Riset eksperimental membuktikan bahwa teknik pengumuman kebijakan, kejelasan data, dan legitimasi institusi sangat berpengaruh terhadap kemauan warga untuk berko-produksi bersama pemerintah (Lestari & Utomo, 2024).

Dimensi digital turut memainkan peran krusial. Studi mengenai penerapan super-app pelayanan publik menunjukkan bahwa integrasi kanal digital memperluas akses layanan, memfasilitasi partisipasi warga, dan membangun siklus umpan balik bagi inovasi. Akan tetapi, tanpa tata kelola data yang baik, dukungan lintas-organisasi, serta literasi digital masyarakat, keberlanjutan inovasi digital sulit terwujud (Dewi, Sari, & Puspitasari, 2024; Wulandari & Darmawan, 2024). Temuan serupa juga terlihat dalam analisis e-readiness pemerintah daerah, di mana kepemimpinan, kapasitas SDM, tata kelola keamanan, dan sosialisasi publik menjadi prasyarat utama akselerasi transformasi digital (Basri, Aziz, & Iqbal, 2024). Dalam konteks tata kelola lingkungan, praktik dynamic governance pada kebijakan pengelolaan persampahan di Batam menunjukkan bahwa kolaborasi dengan komunitas dan dunia usaha memperkuat keberlanjutan program (Fadhlurrahman & Riyadi, 2024). Hal ini sejalan dengan kajian perencanaan pembangunan di Surakarta yang menegaskan pentingnya tipe tata kelola kolaboratif yang berbasis pembagian peran jelas dan kanal deliberasi konsisten (Nugraha & Purnomo, 2024).

Tantangan lain datang dari ruang digital. Disinformasi dan hoaks terbukti menggerus kepercayaan publik terhadap kebijakan pemerintah, sehingga kolaborasi multi-aktor, termasuk media dan komunitas, menjadi penting untuk menjaga integritas informasi (Prabowo & Santoso, 2024). Pada ranah ekonomi lokal, praktik kebijakan berbasis bukti pada pengembangan agroindustri UMKM juga memperlihatkan nilai strategis kolaborasi lintas aktor dalam merumuskan kebijakan responsif dan adaptif (Purnamasari & Hakim, 2025).

Lebih jauh, agenda inklusi sosial dan pemberdayaan masyarakat lokal juga menjadi dimensi penting dalam membangun keberlanjutan inovasi. Pelibatan komunitas sebagai co-designer program pembangunan terbukti meningkatkan daya tahan inovasi berbasis potensi lokal (Rahayu & Simanjuntak, 2024; Setiawan & Mahardika, 2024). Pada akhirnya, inovasi berkelanjutan tidak hanya bergantung pada aspek teknis maupun regulasi, tetapi juga pada penguatan sinergi aktor hexahelix yang mampu menghadirkan tata kelola kolaboratif berorientasi keberlanjutan (Siregar & Widodo, 2023). Dari sintesis penelitian-penelitian tersebut, terlihat research gap yang relevan untuk dikaji lebih lanjut di Kota Banjar : bagaimana konfigurasi hexahelix dipetakan secara operasional dalam siklus inovasi daerah.

LANDASAN TEORI

Perkembangan model kolaborasi inovasi tidak berhenti pada konsep Triple Helix yang diperkenalkan oleh Etzkowitz dan Leydesdorff (1995), yang menekankan interaksi antara pemerintah, akademisi, dan dunia usaha sebagai motor penggerak inovasi. Dalam dinamika pembangunan modern, model ini kemudian berkembang menjadi Quadruple Helix, yang menambahkan unsur masyarakat atau komunitas sebagai aktor keempat. Model ini menekankan pentingnya partisipasi publik, civil society, serta budaya dan media sebagai bagian dari ekosistem inovasi (Carayannis & Campbell, 2009). Kehadiran masyarakat dalam Quadruple Helix memperluas perspektif pembangunan, tidak hanya berbasis pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada legitimasi sosial, inklusivitas, dan keberlanjutan nilai.

Selanjutnya, konsep ini berkembang menjadi Pentahelix, yang secara umum mengintegrasikan lima unsur yaitu pemerintah, akademisi, bisnis, komunitas, dan media. Dalam konteks Indonesia, model Pentahelix banyak diadopsi dalam kebijakan pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif, sebagaimana dipopulerkan dalam kebijakan Kementerian Pariwisata. Media dalam model ini berperan sebagai akselerator informasi, pembentuk opini publik, serta penguat branding dan diseminasi inovasi. Dengan demikian, Pentahelix menekankan pentingnya komunikasi strategis dan kolaborasi berbasis jejaring dalam mempercepat pembangunan daerah.

Perkembangan lebih lanjut melahirkan Hexahelix, yang menambahkan sektor keuangan atau lembaga pembiayaan sebagai aktor keenam. Kehadiran sektor keuangan menjadi krusial dalam menjamin keberlanjutan inovasi melalui dukungan pendanaan, investasi, serta skema pembiayaan kreatif. Dalam konteks tata kelola pemerintahan daerah, model Hexahelix dipandang lebih komprehensif karena mampu mengintegrasikan aspek regulasi, pengetahuan, produksi, partisipasi sosial, komunikasi publik, dan pembiayaan dalam satu kerangka kolaboratif yang utuh. Dengan demikian, evolusi dari Triple Helix hingga Hexahelix menunjukkan pergeseran paradigma dari kolaborasi berbasis institusi inti menuju ekosistem inovasi yang lebih partisipatif, inklusif, dan berkelanjutan. Model ini relevan dalam menjawab kompleksitas pembangunan daerah di era governance modern yang menuntut sinergi multiaktor dan integrasi lintas sektor. Akademisi berperan dalam menyediakan basis pengetahuan, hasil penelitian, serta inovasi yang dapat diimplementasikan pada kebijakan dan program pembangunan daerah. Peran ini sangat penting agar inovasi yang dilakukan pemerintah berbasis pada data ilmiah dan bukti empiris, bukan sekadar trial and error.

Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan

Kehadiran akademisi juga menjamin objektivitas dalam pengambilan keputusan (Fauzi & Lestari, 2024). Sektor bisnis atau dunia usaha memiliki kontribusi nyata dalam menyediakan dukungan investasi, teknologi, serta akses pasar. Keterlibatan dunia usaha menjadikan inovasi daerah tidak hanya berorientasi pada kebijakan, tetapi juga dapat diwujudkan menjadi produk dan layanan yang memberi manfaat ekonomi. Sinergi ini mendukung terciptanya pembangunan daerah yang berdaya saing (Hidayat & Firmansyah, 2024). Komunitas dan masyarakat sipil menjadi aktor yang merepresentasikan kepentingan publik. Peran mereka sangat penting dalam memastikan inovasi yang lahir benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kolaborasi dengan komunitas juga menciptakan partisipasi aktif warga dalam pembangunan, yang merupakan fondasi dari keberlanjutan inovasi (Putri & Ananda, 2024).

Media memiliki fungsi strategis sebagai saluran komunikasi, penyebaran informasi, serta alat kontrol sosial. Dengan keterlibatan media, proses inovasi dapat dipublikasikan secara luas sehingga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah. Media juga membantu menciptakan kesadaran publik mengenai pentingnya inovasi berkelanjutan (Wibowo & Rahmawati, 2023). Selain itu, sektor keuangan memegang peran vital dalam menjamin keberlanjutan pendanaan inovasi. Tanpa dukungan finansial yang memadai, inovasi berisiko berhenti di tengah jalan. Peran lembaga keuangan, baik perbankan maupun lembaga mikro, adalah memastikan ketersediaan sumber daya ekonomi untuk mendukung implementasi kolaborasi hexahelix (Kurniawan & Sari, 2025).

Dengan demikian, landasan teori kolaborasi hexahelix menekankan pentingnya sinergi antar-aktor dalam membangun ekosistem inovasi berkelanjutan di tingkat lokal. Pemerintah Kota Banjar sebagai salah satu daerah otonom dapat memanfaatkan model ini untuk mendorong tata kelola kolaboratif. Konsep tersebut sejalan dengan arah pembangunan nasional yang menekankan pada penguatan inovasi daerah sebagai strategi meningkatkan daya saing global (Mahendra & Yuliani, 2025).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk menganalisis konfigurasi operasional hexahelix dalam siklus inovasi daerah di Kota Banjar. Fokus penelitian diarahkan pada pemetaan peran, pola interaksi, serta tingkat institusionalisasi kolaborasi enam aktor—pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas, media, dan sektor keuangan—pada tahap inisiasi, perumusan, implementasi, evaluasi, hingga replikasi inovasi. Informan ditentukan secara purposive berdasarkan keterlibatan langsung dalam proses inovasi daerah, dengan kemungkinan pengembangan melalui snowball sampling. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi terbatas pada forum kolaborasi, serta studi dokumentasi terhadap dokumen perencanaan, regulasi, dan laporan inovasi. Analisis data dilakukan secara interaktif melalui reduksi, penyajian dalam matriks konfigurasi aktor dan tahapan inovasi, serta penarikan kesimpulan yang diverifikasi melalui triangulasi sumber dan metode. Hasil penelitian diharapkan menghasilkan model empiris konfigurasi hexahelix yang menjelaskan pola kolaborasi dan faktor keberlanjutan inovasi daerah secara kontekstual.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konfigurasi kolaborasi hexahelix di Kota Banjar belum sepenuhnya membentuk ekosistem inovasi yang terintegrasi, melainkan masih didominasi pola hubungan hierarkis dengan pemerintah sebagai simpul utama (central node). Dalam konteks permasalahan Kota Banjar—yang meliputi keterbatasan kapasitas fiskal daerah, rendahnya diversifikasi ekonomi lokal, belum optimalnya transformasi digital pelayanan publik, serta lemahnya daya saing UMKM berbasis potensi lokal—model hexahelix seharusnya berfungsi sebagai mekanisme distribusi peran dan risiko secara kolektif. Namun secara empiris, pemerintah daerah masih berperan dominan sebagai regulator dan fasilitator administratif, sementara aktor lain belum terintegrasi dalam siklus inovasi dari tahap perumusan hingga evaluasi dan replikasi.

Dari sisi akademisi, keterlibatan memang terlihat dalam bentuk riset kebijakan, penyusunan naskah akademik, serta pendampingan program tertentu. Akan tetapi, relasi tersebut bersifat episodik dan berbasis proyek, belum terinstitusionalisasi dalam sistem inovasi daerah. Akibatnya, inovasi yang dihasilkan belum sepenuhnya berbasis evidence dan belum memiliki mekanisme monitoring berbasis data yang berkelanjutan. Dalam konteks Kota Banjar yang sedang berupaya meningkatkan kualitas layanan publik dan daya saing ekonomi lokal, absennya integrasi pengetahuan ini menyebabkan inovasi cenderung reaktif dan belum membentuk learning system antarperangkat daerah. Pada dimensi dunia usaha, penelitian menemukan bahwa pelaku bisnis lokal memiliki potensi besar dalam mendukung inovasi berbasis kearifan lokal, khususnya sektor perdagangan, jasa, dan UMKM. Namun keterlibatan mereka masih terbatas pada peran penerima kebijakan (policy taker), bukan sebagai co-creator kebijakan. Hambatan utama terletak pada minimnya insentif investasi, belum adanya skema kemitraan publik-swasta yang jelas, serta terbatasnya akses pasar regional. Dalam kerangka hexahelix, kondisi ini menunjukkan belum terbentuknya collaborative value chain antara pemerintah, bisnis, dan sektor keuangan. Sektor keuangan sendiri menjadi simpul terlemah dalam konfigurasi hexahelix Kota Banjar. Penelitian tidak menemukan adanya skema pembiayaan inovasi daerah yang dirancang secara khusus, baik dalam bentuk blended finance, dana bergulir inovasi, maupun kemitraan pembiayaan berbasis proyek. Padahal, dengan kapasitas fiskal yang relatif terbatas, keberlanjutan inovasi di Banjar sangat bergantung pada diversifikasi sumber pembiayaan. Ketiadaan desain pembiayaan inovatif ini menyebabkan banyak program inovasi berhenti pada tahap pilot project dan tidak berlanjut secara sistemik. Pada aspek masyarakat dan komunitas, partisipasi publik sudah mulai tumbuh melalui forum musrenbang, komunitas kreatif, dan inisiatif sosial berbasis lingkungan. Namun partisipasi tersebut masih bersifat konsultatif, belum mencapai tingkat co-production atau shared ownership. Dalam sejumlah program penataan lingkungan dan pemberdayaan ekonomi lokal, masyarakat dilibatkan sebagai pelaksana, tetapi belum memiliki ruang deliberatif yang kuat dalam menentukan arah inovasi. Akibatnya, inovasi belum sepenuhnya menjawab kebutuhan riil masyarakat secara partisipatif.

Peran media di Kota Banjar juga belum optimal sebagai agen legitimasi dan diseminasi inovasi. Publikasi media lebih banyak berfokus pada dinamika politik lokal dibandingkan pada penguatan narasi keberhasilan inovasi publik. Padahal, dalam pendekatan hexahelix, media memiliki fungsi strategis sebagai amplifier dan trust builder yang dapat meningkatkan legitimasi kebijakan sekaligus mendorong partisipasi warga. Lemahnya strategi komunikasi publik ini berimplikasi pada rendahnya awareness masyarakat terhadap program inovasi daerah.

Secara teoretis, konfigurasi hexahelix Kota Banjar masih berada pada tahap koordinatif, belum mencapai kolaborasi integratif dan sinergis. Relasi antaraktor masih bersifat sektoral dan belum berbasis pembagian peran strategis yang jelas dalam setiap tahapan siklus inovasi. Belum terbentuknya platform kolaborasi permanen, lemahnya mekanisme berbagi data lintas sektor, serta belum adanya regulasi khusus yang mengatur ekosistem inovasi daerah menjadi faktor pembatas utama. Namun demikian, penelitian juga menemukan potensi transformasional. Kota Banjar memiliki modal sosial komunitas yang relatif kuat, kedekatan geografis antaraktor, serta fleksibilitas birokrasi yang lebih adaptif dibanding kota besar. Jika diformulasikan secara tepat, model hexahelix di Banjar dapat diarahkan menuju kemitraan transformasional dengan strategi: (1) pembentukan forum inovasi daerah berbasis regulasi, (2) integrasi akademisi dalam monitoring dan evaluasi berbasis data, (3) penciptaan skema pembiayaan kolaboratif dengan sektor keuangan, (4) penguatan insentif investasi UMKM berbasis potensi lokal, serta (5) pengembangan strategi komunikasi publik berbasis media lokal dan digital.

Dengan demikian, hasil penelitian menegaskan bahwa permasalahan utama Kota Banjar bukan terletak pada ketiadaan aktor hexahelix, melainkan pada belum terbangunnya orkestrasi kolaborasi yang sistemik. Keberlanjutan inovasi daerah hanya dapat dicapai apabila relasi antaraktor bergeser dari pola administratif menuju ekosistem kolaboratif berbasis kepercayaan, pembagian peran strategis, dan pembiayaan berkelanjutan. Dalam kerangka tersebut, hexahelix bukan sekadar model konseptual, melainkan instrumen tata kelola yang mampu menjawab tantangan fiskal, ekonomi, sosial, dan digital Kota Banjar secara terpadu.

KESIMPULAN

Implementasi model kolaborasi *hexahelix* dalam mewujudkan inovasi berkelanjutan di Kota Banjar masih berada pada tahap koordinasi dasar dan belum sepenuhnya mencapai sinergi strategis. Pemerintah masih memegang peran dominan sebagai penggerak utama, sementara kontribusi aktor lain seperti akademisi, sektor bisnis, media, masyarakat, dan lembaga keuangan belum berjalan seimbang. Kondisi ini menimbulkan keterbatasan dalam efektivitas program inovasi, karena inovasi yang dihasilkan cenderung parsial, sektoral, dan kurang berkelanjutan. Namun demikian, potensi besar terlihat dalam peran akademisi sebagai penyedia basis riset, masyarakat sebagai penggerak partisipasi, serta dunia usaha sebagai katalis pertumbuhan ekonomi lokal. Jika seluruh aktor dapat diposisikan secara setara dalam kemitraan transformasional yang inklusif dan berbasis kepercayaan, maka inovasi di Kota Banjar berpeluang menjadi model tata kelola kolaboratif yang memperkuat daya saing daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriani, N., & Pratama, R. (2023). Governance innovation in regional development: A hexahelix perspective. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, 15(2), 145–160.
- Fauzi, A., & Lestari, D. (2024). Peran akademisi dalam penguatan inovasi daerah berbasis riset. *Jurnal Administrasi Publik Indonesia*, 11(2), 45–56.
- Hidayat, M., & Firmansyah, R. (2024). Kolaborasi dunia usaha dalam pembangunan daerah berkelanjutan. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Daerah*, 8(1), 77–89.
- Kurniawan, B., & Sari, M. (2025). Peran lembaga keuangan dalam mendukung ekosistem

Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan

- inovasi daerah. *Jurnal Manajemen Keuangan Publik*, 9(1), 13–25.
- Mahendra, T., & Yuliani, S. (2025). Inovasi daerah dalam kerangka pembangunan berkelanjutan. *Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan Publik*, 12(1), 55–70.
- Nurhadi, A., & Susanti, F. (2024). Collaborative governance in innovation policy: A study of regional practices. *Jurnal Politik dan Pemerintahan*, 19(1), 22–34.
- Prasetyo, D., & Wulandari, T. (2024). Sustainability and innovation governance in local government. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 21(3), 200–215.
- Putri, A., & Ananda, R. (2024). Partisipasi komunitas dalam implementasi model hexahelix. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 9(2), 33–44.
- Rahayu, S., & Purnomo, D. (2023). Model hexahelix dalam tata kelola inovasi daerah. *Jurnal Inovasi dan Kebijakan Publik*, 7(1), 21–34.
- Ramadhan, Y., & Dewi, K. (2023). Peran sektor swasta dalam mendukung inovasi daerah berkelanjutan. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Daerah*, 18(2), 150–163.
- Santoso, H., & Lestari, Y. (2023). Integrasi kebijakan daerah dalam mendukung inovasi kolaboratif. *Jurnal Kebijakan Publik*, 14(2), 65–78.
- Sari, D., & Utami, E. (2025). Kolaborasi multi pihak dalam mendorong pembangunan berkelanjutan. *Jurnal Pembangunan dan Inovasi Daerah*, 10(1), 44–59.
- Septiani, M., & Hidayah, A. (2024). Academic contributions to regional innovation ecosystems. *Jurnal Pendidikan dan Kebijakan*, 14(1), 77–91.
- Setiawan, R., & Lestari, P. (2025). Governance and sustainable innovation: The role of local institutions. *Jurnal Tata Kelola Daerah*, 11(1), 28–41.
- Siregar, E., & Lubis, H. (2025). Implementasi kolaborasi hexahelix dalam pembangunan daerah. *Jurnal Inovasi Pemerintahan*, 13(1), 90–104.
- Sutrisno, H., & Handayani, M. (2023). Peran pemerintah daerah sebagai katalisator inovasi. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Nusantara*, 10(2), 112–124.
- Syafitri, D., & Rahman, F. (2023). Kolaborasi pemerintah dan media dalam mendorong inovasi publik. *Jurnal Komunikasi dan Kebijakan*, 16(2), 134–147.
- Utami, R., & Nugroho, A. (2024). Digital transformation in public services: A hexahelix collaboration approach. *Jurnal Teknologi dan Pemerintahan*, 6(1), 55–68.
- Wardani, L., & Nugraha, D. (2024). Strengthening regional competitiveness through collaborative innovation. *Jurnal Administrasi Daerah*, 20(2), 88–102.
- Wibowo, A., & Rahmawati, L. (2023). Peran media dalam mendukung tata kelola kolaboratif. *Jurnal Komunikasi Pembangunan*, 15(1), 98–110.
- Wijaya, A., & Pramudita, S. (2024). Media strategies in collaborative governance for sustainable innovation. *Jurnal Komunikasi dan Inovasi*, 12(2), 119–132.
- Yuliana, R., & Prasetya, B. (2025). Evaluasi kebijakan inovasi berbasis kolaborasi di daerah. *Jurnal Evaluasi Kebijakan Publik*, 8(1), 73–85.
- Yuniar, R., & Maulana, I. (2024). Community empowerment and innovation in sustainable governance. *Jurnal Sosial dan Pembangunan*, 19(2), 101–115.